

Kebijakan Kebijakan Pemerintahan Kabinet Kerja Dalam Mensejahterakan Rakyat

Lorencya Putri Davina Barus^{1*}, Natasya Sri Ayunda^{2*}, Nazria Ulfani^{3*}

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra

¹lorencyab@gmail.com, ²natasyasriayunda1212@gmail.com, ³Nazriaulfani998@gmail.com

Abstrak

The Working Cabinet government under President Joko Widodo brought a new spirit in an effort to improve people's welfare. Through various policies in the fields of education, economy, and health, the government seeks to answer the real challenges faced by the people, such as limited access to education, employment, and health services. In the education sector, programs such as the Smart Indonesia Card (KIP) and Strengthening Character Education (PPK) are present to expand learning opportunities, especially for children from underprivileged families. In the economic sector, infrastructure development and tax incentives are directed at strengthening growth and opening up job opportunities. Meanwhile, in the midst of a global health crisis, the government is also implementing various policies to strengthen the national health system. Despite many positive achievements, implementation in the field still faces various obstacles. Therefore, thorough evaluation and continuous improvement are important so that these policies truly benefit all Indonesians equally.

Keyword

Kebijakan Pemerintah, Kabinet Kerja, Kesejahteraan Rakyat

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak

Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo membawa semangat baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, pemerintah berusaha menjawab tantangan nyata yang dihadapi rakyat, seperti keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) hadir untuk memperluas kesempatan belajar, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur dan insentif pajak diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan dan membuka peluang kerja. Sementara itu, di tengah krisis kesehatan global, pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan guna memperkuat sistem kesehatan nasional. Meskipun banyak capaian positif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan menjadi penting agar kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar memberi manfaat merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keywords

Kebijakan Pemerintah, Kabinet Kerja, Kesejahteraan Rakyat

Pendahuluan

Di masa pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama. Melalui berbagai kebijakan di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, pemerintah berusaha menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kesenjangan sosial, sulitnya akses layanan dasar, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, konsep Nawacita dijadikan pedoman utama yang memuat sembilan agenda prioritas untuk membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat ekonomi nasional, dan memperluas pelayanan publik.

Salah satu bentuk konkret kebijakan di bidang pendidikan adalah peluncuran Program Indonesia Pintar (PIP), yang menurut Ismayani (2019), menjadi solusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa hambatan biaya. Selain itu, Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) juga dijalankan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa sejak dini, seperti yang dijelaskan oleh Khotimah (2019).

Upaya ini dilakukan agar generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Di bidang ekonomi, pemerintah menjalankan berbagai strategi seperti pemberian insentif pajak dan penguatan industri lokal. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ekonomi, 2025), kebijakan ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan gambaran utuh tentang peran nyata pemerintahan Kabinet Kerja dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif kajian literatur. Kajian literatur yaitu penelitian yang bersumber dari buku maupun artikel yang dianalisis berdasarkan permasalahan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung tetapi diperoleh berdasarkan hasil penelitian ataupun kajian literatur. Data yang ditemukan dari berbagai literatur kemudian dikumpulkan dalam satu kesatuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah ide atau konsep yang sering kita dengar, bicarakan, dan lakukan, tetapi sering kali tidak dipahami dengan baik. Dasar utama dari kebijakan ini adalah pemikiran yang logis dan kebutuhan yang ada di lapangan.

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah gagasan atau konsep yang kerap didengar, dibahas, dan diterapkan, namun seringkali belum benar-benar dipahami secara mendalam. Kebijakan ini pada dasarnya berlandaskan pada pemikiran rasional serta kebutuhan nyata yang terjadi di lapangan. Inti dari kebijakan ini adalah pengaturan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperjelas visi dan misi sekolah, sehingga dapat meraih tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis (Nanti & Fadriati, 2023).¹ Komponen utama dari kebijakan pendidikan meliputi tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampaknya.

Ciri-ciri dari kebijakan pendidikan antara lain memiliki tujuan yang terarah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dilengkapi dengan konsep operasional yang telah dirumuskan, disusun oleh pihak yang berwenang, dapat dievaluasi, serta disusun dalam sistem yang tertib dan sistematis. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan politik, struktural, prosedural, dan manajerial (Patandung & Panggu, 2022).²

Dalam bidang Pendidikan, Presiden Joko Widodo menghasilkan beberapa kebijakan yang memberi perkembangan dalam dunia Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a) Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Mengacu pada Arahan Presiden Nomor 7 Tahun 2014, PIP adalah kelanjutan dari program bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan bantuan finansial kepada para siswa agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah biaya. Bantuan berupa dana tunai ini diberikan kepada pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, guna membantu mencukupi kebutuhan pendidikan mereka, seperti biaya sekolah dan perlengkapan belajar. Selain itu, PIP juga bertujuan mencegah siswa dari keluarga miskin agar tidak terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan (Ismayani, 2019).³

b) Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan inisiatif dalam dunia pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk membentuk dan memperkuat karakter siswa melalui pengembangan aspek emosional, empati, intelektual, dan fisik. Program ini juga mengajak keterlibatan masyarakat secara aktif serta membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam kerangka Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Urgensi dari pelaksanaan PPK antara lain adalah karena pembangunan sumber daya manusia menjadi landasan

¹ Nanti, S., & Fadriati. (2023). *Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan di Sekolah*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, XI, 147–154.

² Patandung, Y., & Panggu, S. (2022). *Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional*. Jurnal Sinestesia, 12(2), 794–805.

³ Ismayani, Maya Sri, dkk. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, 4 (1), 38-45.

utama bagi kemajuan bangsa. Peserta didik di abad ke-21 dituntut untuk memiliki karakter yang kuat, literasi dasar, serta kompetensi 4C (Critical thinking, Creativity, Communication, Collaboration) guna menghadapi tantangan dan menjadi bagian dari Generasi Emas 2045. Program ini juga merespons fenomena menurunnya moral, etika, dan budi pekerti di kalangan pelajar. Tujuan utamanya adalah mendorong internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter secara luas dan efektif melalui lembaga pendidikan, dengan menekankan pada nilai-nilai tertentu yang diprioritaskan dalam pembelajaran. Harapannya, pendidikan karakter dapat mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia menjadi lebih jujur dan baik (Khotimah, 2019).⁴

c) Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Revitalisasi Pendidikan Vokasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu serta daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya pembaruan dan penguatan pendidikan kejuruan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Diharapkan, revitalisasi pendidikan kejuruan ini mampu membawa dampak positif terhadap kualitas SMK maupun lulusan yang dihasilkannya (Wening, 2017).⁵

d) Kebijakan zonasi adalah

Kebijakan zonasi merupakan aturan yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan OSIS. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa dalam mengakses layanan pendidikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan, yang selama ini menjadi tantangan tersendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap melalui kebijakan ini, seluruh sekolah dapat menjadi sekolah unggulan. Dengan demikian, zonasi dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan dan inklusi dalam dunia pendidikan (Pradewi, 2019).⁶

Kebijakan Pemerintahan di Bidang Ekonomi

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat neraca transaksi berjalan, berikut ini adalah keempat paket tersebut yaitu:

⁴ Khotimah, Desy Nurlaida. (2019). *Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui Kegiatan 5s di Sekolah Dasar*. Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2 (1), 28-31.

⁵ Wening, Sri. (2017). *Revitalisasi Pendidikan Vokasi Melalui Inovasi Sistem Penilaian Berbasis Kecakapan Abad Ke-21*. Prosiding Pendidikan Teknik Tata Boga FT UNY.

⁶ Pradewi, Gunarti Ika, Rukiyati. (2019). *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 4 (1), 28-34.

a) Kebijakan Insentif Pajak

- 1) Fasilitas perpajakan berupa tunjangan yang diberikan kepada perusahaan yang menciptakan kesempatan kerja, memanfaatkan bahan kandungan lokal, fokus pada ekspor hingga 30% dari produksi, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- 2) Insentif tambahan diberikan secara khusus kepada perusahaan yang melakukan reinvestasi dari keuntungan yang diperoleh dari dividen. Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) diterapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor logistik, termasuk kapal galangan, peralatan yang terkait dengan industri kereta api, transportasi udara, dan sejenisnya.

b) Perlindungan Produk Dalam Negeri

- 1) Penggunaan tarif antidumping sementara dan tarif pengamanan sementara dilakukan pada produk industri yang diimpor yang terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil.
- 2) Penggunaan surat kredit untuk produk sumber daya alam, seperti pertambangan, batubara, minyak dan gas, serta CPO.
- 3) Restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik dilakukan dengan menghadirkan perusahaan reasuransi milik negara yang merupakan hasil penggabungan dari dua perusahaan reasuransi kecil menjadi satu perusahaan reasuransi nasional.

c) Bebas Visa untuk Kunjungan Sementara Wisatawan dari 30 Negara.

d) Kewajiban Penggunaan Biofuel hingga 15%.⁷

Kebijakan Pemerintahan di Bidang Kesehatan

Tantangan kebijakan muncul pada masa pandemi. Pandemi tidak hanya membawa tantangan dalam menangani penyakit itu sendiri, tetapi juga menjadi pendorong perubahan yang signifikan dalam struktur dan paradigma kesehatan masyarakat secara keseluruhan. (Fadlilah et al., 2023).⁸

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan selama masa pandemi, yang meliputi kebijakan sosial, kebijakan protokol kesehatan, kampanye vaksinasi, serta kebijakan bantuan ekonomi. (Satrianny et al., 2023).⁹ Dalam upaya untuk menerapkan pengaruh kebijakan-kebijakan ini, akan melibatkan evaluasi yang komprehensif yang

⁷Ekon. 4. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1569/4-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah>. 10/03/2025.

⁸ Fadlilah, A. H., Dambe, D.N., Cakranegara, P. A., Djohan, D., & Moridu, I. (2023). *Literature Review: Diferensiasi Efek Current Ratio dan Profitability Ratio pada Harga Saham Perusahaan*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(2), 1105–1118.

⁹ Satrianny, I. P., Lim, B., & Gunawan, E. (2023). *The Influence of Service Quality Toward Customer Satisfaction at CV. Indako Trading Co, Medan*. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 5(3), 309–314.

tidak hanya fokus pada aspek epidemiologi, tetapi juga mencakup analisis aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. (Duffin, 2023).¹⁰

Kebijakan efektivitas perbankan sosial dan protokol kesehatan telah menjadi fokus utama dalam upaya mengendalikan penyebaran penyakit, terutama selama pandemi COVID-19. (Gani et al., 2023).¹¹ Meskipun mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, kebijakan ini telah terbukti sebagai tindakan yang penting dalam melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan sosial, termasuk pengurangan interaksi sosial dan penutupan tempat-tempat umum, telah terbukti efektif dalam memutus rantai penularan virus (Harianto & Sari, 2022).¹²

Keputusan untuk membatasi pergerakan warga merupakan strategi yang diterapkan oleh banyak negara sebagai tindakan terhadap penyebaran cepat virus. Selain itu, pemakaian masker menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat dianjurkan, terutama dalam kondisi di mana sulit untuk menjaga jarak fisik (Tyas et al., 2023).¹³

Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi masyarakat, terutama dalam lingkungan di mana penyebaran virus dapat terjadi dengan cepat (Jufrizal et al., 2023).¹⁴ Dengan demikian, kebijakan penegakan sosial dan protokol kesehatan bukan hanya sebagai reaksi sementara terhadap pandemi, tetapi merupakan strategi yang teruji dan efektif dalam merespons serta mengurangi dampak penyakit menular (Loh, 2021).¹⁵ Meskipun memberikan ketidaknyamanan sementara, kebijakan ini dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sasmito, Aljufri, et al., 2024).¹⁶

¹⁰ Duffin, D. (2023). *The Influence of Environmental Cost and Environmental Performance towards Company's Value Moderated by Ownership Structure*. Journal of Economics and Business UBS, 12(1), 626–641.

¹¹ Gani, R. J. P. R., Rahmah, R., Aliyati, N. N., Tusi, J. S., & Sasmito, P. (2023). *Konsumsi gula pasir dan konsumsi serat terhadap kejadian Diabetes Melitus*. Holistik Jurnal Kesehatan, 17(3), 246–252

¹² Harianto, A., & Sari, E. N. (2022). *Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Kapasitas Guru Terhadap Pemahaman Akuntansi Dengan Ilc Sebagai Variabel Moderasi Pada Smk Akuntansi Bagian Medan Utara*. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 8(2), 185–196.

¹³ Tyas, E. S., Hartono, S., Wahyuni, E. S., Muhammad, H. N., Prasetya, F. I., & Sasmito, P. (2023). *The Effect of Abdominal Stretching, Yoga, and Dysmenorrhea Exercises on Prostaglandin Levels and Pain*. International Journal of Public Health Excellence (IJPHE), 3(1), 442–449.

¹⁴ Jufrizal, J., Nurprilinda, M., Mertha, I. M., Nurhayati, C., Suardana, I. K., Margono, M., Sasmito, P., Juwariyah, S., Ose, M. I., & Wulansari, Y. W. (2023). *BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁵ Loh, R. (2021). *PENGARUH PUBLIC RELATION TERHADAP EFEKTIVITAS PERUSAHAAN PADA PT GLOBAL AKSARA MOTOR MEDAN*. Jurnal BIKOM, 4(1), 12

¹⁶ Djohan, D., & Loh, R. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*. Jurnal BIKOM, 4(2).

¹⁷ Sasmito, P., Aljufri, S., Mulyati, L., Rasmita, D., Syafridawita, Y., Deviana, E., Komariah, E., Gayatri, S. W., & Arifani, N. (2024). *A Systematic Review: Early Warning System for Hospital Wards*. International Journal of Public Health Excellence (IJPHE), 3(2), 647–655.

Kesimpulan

Pemerintahan Joko Widodo melalui Kabinet Kerja telah mengimplementasikan berbagai kebijakan di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor pendidikan, program KIP dan PPK memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok kurang mampu. Sementara itu, di sektor ekonomi, kebijakan pembangunan infrastruktur, insentif pajak, dan hilirisasi sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada sektor kesehatan, pemerintah berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi melalui kebijakan pembatasan sosial, protokol kesehatan, dan kampanye vaksinasi. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti distribusi layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, kebijakan Kabinet Kerja telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih merata dan berkelanjutan, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna mengatasi berbagai tantangan yang masih ada terutama pasca pemerintahan ini berkuasa.

Daftar Pustaka

Djohan, D., & Loh, R. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*. Jurnal BIKOM, 4(2).

Duffin, D. (2023). The Influence of Environmental Cost and Environmental Performance towards Company's Value Moderated by Ownership Structure. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 626–641.

Ekon. 4. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1569/4-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah>. 10/03/2025.

Fadlilah, A. H., Dambe, D.N., Cakranegara, P. A., Djohan, D., & Moridu, I. (2023). *Literature Review: Diferensiasi Efek Current Ratio dan Profitability Ratio pada Harga Saham Perusahaan*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1105–1118.

Gani, R. J. P. R., Rahmah, R., Aliyati, N. N., Tusi, J. S., & Sasmito, P. (2023). *Konsumsi gula pasir dan konsumsi serat terhadap kejadian Diabetes Melitus*. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(3), 246–252.

Harianto, A., & Sari, E. N. (2022). *Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Kapasitas Guru Terhadap Pemahaman Akuntansi Dengan Ilc Sebagai Variabel Moderasi*

Pada Smk Akuntansi Bagian Medan Utara. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 8(2), 185–196.

Ismayani, Maya Sri, dkk. (2019). *Implementasi Program IndonesiaPintar (PIP)*. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, 4 (1), 38-45.

Jufrizal, J., Nurprilinda, M., Mertha, I. M., Nurhayati, C., Suardana, I. K., Margono, M., Sasmito, P., Juwariyah, S., Ose, M. I., & Wulansari, Y. W. (2023). *BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Loh, R. (2021). *PENGARUH PUBLIC RELATION TERHADAP EFEKTIVITAS PERUSAHAAN PADA PT GLOBAL AKSARA MOTOR MEDAN*. Jurnal BIKOM, 4(1), 12.

Khotimah, Desy Nurlaida. (2019). *Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui Kegiatan 5s di Sekolah Dasar*. Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2 (1), 28-31.

Nanti, S., & Fadriati. (2023). *Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan di Sekolah*. Equilbirum: Jurnal Pendidikan, XI, 147–154.

Patandung, Y., & Panggu, S. (2022). *Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional*. Jurnal Sinestesia, 12(2), 794–805.

Pradewi, Gunarti Ika, Rukiyati. (2019). *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*. JMS (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 4 (1), 28-34.

Sasmito, P., Aljufri, S., Mulyati, L., Rasmita, D., Syafridawita, Y., Deviana, E., Komariah, E., Gayatri, S. W., & Arifani, N. (2024). A Systematic Review: *Early Warning System for Hospital Wards*. International Journal of Public Health Excellence (IJPHE), 3(2), 647–655.

Satrianny, I. P., Lim, B., & Gunawan, E. (2023). *The Influence of Service Quality Toward Customer Satisfaction at CV. Indako Trading Co, Medan*. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES), 5(3), 309–314.

Tyas, E. S., Hartono, S., Wahyuni, E. S., Muhammad, H. N., Prasetya, F. I., & Sasmito, P. (2023). *The Effect of Abdominal Stretching, Yoga, and Dysmenorrhea Exercises on Prostaglandin Levels and Pain*. International Journal of Public Health Excellence (IJPHE), 3(1), 442–449.

Wening, Sri. (2017). *Revitalisasi Pendidikan VokasiMelalui Inovasi Sistem Penilaian Berbasis Kecakapan Abad Ke-21*. Prosiding Pendidikan Teknik Tata Boga FT UNY.